

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. GAMBARAN UMUM SKPD/ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng terletak di Jalan Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng yang menangani 1 urusan Pemerintahan, yakni Urusan Wajib **di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki lokasi perkantoran di lantai I Gabungan Dinas, dengan nilai aset yang dikelola sebesar Rp. 2.292.837.111.00,-. Dalam menjalankan fungsinya didukung dengan sarana dan prasarana antara lain sebagai berikut :

1. Peralatan dan Mesin

Berupa Aset Tetap, Extracomptabel dan aset lain-lain

2. Peralatan dan perlengkapan kantor berupa :

- mesin tik
- Lemari Pendingin
- Televisi
- Komputer/PC & Note book
- AC
- Kamera
- Printer
- Sound System

3. Peralatan kantor meubelair berupa :

- Meja kerja
- Kursi kerja
- Lemari

4. Peralatan Penunjang Lainnya

Berdasarkan fungsinya sebagai SKPD yang menangani urusan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng pada Tahun Anggaran 2017, menangani urusannya dengan aparat berjumlah 20 orang Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan IV	=	7 orang
- Golongan III	=	12 orang
- Golongan II	=	1 orang
- Golongan I	=	- orang

Latar belakang pendidikan :

- Sarjana S2 (Master)	=	8 orang
- Sarjana S1	=	8 orang
- Sarjana Muda (D III)	=	1 orang
- SLTA	=	3 orang
- SLTP	=	- orang

## **2. STRUKTUR ORGANISASI**

Kelembagaan Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng, terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng , adalah sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 bahwa Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Soppeng adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

## 2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka fungsi yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng adalah :

- a. Perumusan Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam susunan organisasi, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- d. Bidang Penanaman Modal

### **3. SARANA DAN PRASARANA**

Untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan pelayanan diperlukan sarana dan prasarana SKPD yang memadai, adapun keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

1. Lemari
2. Kendaraan Roda 2
3. Komputer
4. Laptop
5. Mesin Ketik
6. Air Conditioning
7. Kamera
8. Sound System
9. CCTV
10. Televisi
11. Meja kerja
12. Meja Rapat
13. Kursi Kerja
14. Kursi Rapat
15. Mesin Absensi
16. Brankas
17. Printer
18. Scanner
19. Lemari besi
20. Kursi Tamu
21. Sekat dinding
22. UPS

#### **4. LINGKUNGAN STRATEGIS**

Analisis lingkungan strategis sangat penting bagi suatu organisasi karena organisasi tidak terlepas hubungannya dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan internal, maupun lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal mencakup analisis di dalam organisasi baik mengenai sumberdaya, kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki organisasi. Analisis lingkungan eksternal mencakup analisis di luar organisasi baik yang memiliki implikasi langsung terhadap pengaturan atau operasional organisasi, maupun yang tidak memiliki implikasi langsung.

Agar organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Soppeng dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka perlu merespon, memanfaatkan dan menghadapi tantangan dan peluang yang ada secara efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan upaya menemukan, memanfaatkan dan mengelola kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang sedang terjadi.

Analisis lingkungan internal akan memberi gambaran tentang kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis lingkungan eksternal akan memberi gambaran tentang peluang dan ancaman. Metode yang digunakan dalam menganalisis lingkungan strategis ini adalah metode analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats).

##### **a. Lingkungan Internal**

###### **1) Kekuatan**

- a) Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal
- b) Telah tersedianya SDM dengan tingkat pendidikan yang sesuai dengan tuntutan Tersedianya sarana dan prasarana

- c) Tersedianya sarana dan prasarana dalam merintis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2) Kelemahan

- a) Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovasi dan kurang kreatif.
- b) Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis
- c) Belum memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi

b. Lingkungan Eksternal

1) Peluang

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
- b. Adanya penetapan visi dan misi dari RPJP Kabupaten Soppeng Tahun 2016 dan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 yang sejalan dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- c. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng

2) Ancaman

- a. Sanksi pidana Kepala Daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan penyimpangan terhadap APBD
- b. Tidak adanya investor yang masuk
- c. Bertambahnya penduduk yang mengakibatkan tingginya arus urbanisasi

- d. Maraknya PKL degradasi terhadap estetika dan lingkungan,kekumuhan
- e. Instabilitas keamanan daerah
- f. Pengaruh krisis global
- g. Bencana Alam

## **5. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

1. Bangunan Kantor yang belum representatif untuk dikembangkan menjadi instansi pelayanan publik yang memadai dan tidak dapat dikembangkan.
2. Kinerja pelayanan perizinan sangat tergantung dari kinerja tim teknis yang mengeluarkan rekomendasi teknis sementara mereka mempunyai tugas pokok di instansi masing-masing.
3. Aparat pelayanan di front office masih berstatus non PNS
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia aparat pelayanan
5. Sempitnya bangunan kantor sehingga pengarsipan dokumen perizinan tidak memadai.
6. Penataan Loker pelayanan yang belum sesuai dengan kebutuhan pemohon
7. Kondisi ruangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan pelayanan publik yang baik antara lain ruangan laktasi,ruangan untuk penyandang disabilitas dan fasilitas umum untuk pemohon belum dapat dipenuhi.
8. Masih Terbatasnya sumber data untuk pengembangan penanaman modal.

## **6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA**

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Melalui pola penyajian seperti itu sistematika

penyajian laporan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I** : ***Pendahuluan***, menjelaskan secara ringkas mengenai gambaran umum dan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng serta permasalahan yang dihadapi
- Bab. II** : ***Perencanaan Kinerja***, menjelaskan muatan rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng periode tahun anggaran 2017 dan perjanjian kinerja (TAPKIN 2017)
- Bab. III** : ***Akuntabilitas Kinerja***,
- A.** Capaian Kinerja menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran untuk tahun 2017.
- B.** Realisasi Anggaran.
- Bab. IV** : ***Penutup***, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng tahun 2017 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.
- Lampiran** : ***Perjanjian Kinerja, Matriks Renstra, Matriks IKU, SK Penetapan IKU.***



## BAB II

### PERJANJIAN KINERJA

#### 1. RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rencana Strategis ( RENSTRA ) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

**VISI** : Peningkatan iklim investasi dan pelayanan Perizinan Yang Lebih Baik di Kabupaten Soppeng Tahun 2021.

**MISI** :  
**1.** Meningkatkan Daya tarik dan Minat Investasi  
**2.** Meningkatkan Kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan Yang Lebih Baik.

**TUJUAN** : Mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

**Misi 1** : Meningkatkan Daya tarik dan minat Investasi

**Tujuan** : Meningkatkan potensi investasi

**Misi 2** : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih baik.

**Tujuan :** Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI AWAL</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA</b>
Meningkatkan potensi investasi	Peningkatan jumlah jenis investasi di berbagai bidang	40 investor	35 investor	60 investor
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	81 %	80 %	85 %

## **SASARAN**

Mengacu kepada Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatkan potensi investasi

Sasaran : Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi

1. Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi

Tujuan 2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan

Tabel 2.2

## Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI AWAL</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA</b>
Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Peningkatan jumlah investor	40 investor	35 investor	60 investor
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	81 %	80 %	85 %
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %

**PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan

program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM PENDUKUNG</b>
Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Program peningkatan iklim dan promosi investasi
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Program Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini membuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2017 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2017, Indikator Kinerja Utama dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Soppeng

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2017</b>
Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Peningkatan jumlah investor	40 investor	40 investor
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	81 %	81 %
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100 %	100 %
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.5

IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Peningkatan jumlah investor	40 investor	Jumlah investor tahun berjalan – jumlah investor tahun lalu	Daftar rekapitulasi perusahaan/perorangan PMDN
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	81 %	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai standar dibagi jumlah izin yang diterbitkan x 100 %	Laporan penerbitan izin
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	100 %	Jumlah pegawai DPMPSTSP dibagi jumlah total pegawai x 100 %	Rekapitulasi survey Kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi umum dan keuangan
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam	100 %	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi total	Berita Acara rekonsiliasi aset terhadap buku inventaris dan KIB

prasarana kantor	kondisi baik		sarana dan prasarana x 100 %	
---------------------	--------------	--	------------------------------------	--

## RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.822.730.735 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.391.315.335,- (94.70%)
- Belanja Langsung	Rp. 1.431.415.400,- (93.46%)
<hr/>	
Jumlah	Rp. 2.822.730.735,-,- (94,07%)

Tabel 2.6

Rencana Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Soppeng TA 2017

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rencana (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Belanja Tidak Langsung	1.391.315.335	49.29
2	Belanja Langsung	1.431.415.400	50.71
<b>Jumlah</b>		<b>2.822,730.735</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2017

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>PERSENTASE ANGGARAN</b>
Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Peningkatan jumlah investor	167.679.350	11.71
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	364.575.000	25.47
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	749.361.050	52.35
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	149.800.000	10.47



dan prasarana kantor			
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>

Pada tabel diatas, jumlah anggaran unyruk program/kegiatan sebesar Rp. 749.361.050 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan dengan besaran 52,35 %. sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu sebesar 25,47 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor sebesar 10,47 % dari total anggaran belanja langsung.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

<b>NO.</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>	<b>KODE</b>
1.	91<	Sangat Tinggi	ST
2.	76<90	Tinggi	T
3.	66<75	Sedang	S
4.	51<65	Rendah	R
5.	<50	Sangat Rendah	SR

### **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2017**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng untuk tahun 2017. Pencapaian indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Pencapaian Indikator Tahun 2017

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Kondisi Awal</b>	<b>2017</b>			<b>Target Akhir RENSTRA (2018)</b>	<b>Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)</b>
			<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi</b>		
1	Peningkatan jumlah investor	35	40 investor	43 investor	107,5	60 investor	71,67
2	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	80	81 %	59.29	73.20	85 %	69,75
3	Persentase	90 %	100 %	90 %	90 %	100 %	90 %

	kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian						
4	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Dari empat indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng pada tahun 2017, satu indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2017, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, tiga indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 73.20% sampai dengan 90 %.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat dua indikator menunjukkan capaian sangat tinggi 1 indikator menunjukkan capaian yang tinggi, satu indikator dengan capaian sedang dan tidak ada indikator yang capaiannya masih rendah.

## PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2016, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 3.3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan				
				Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2017 Banding 2016	Target (RENSTRA)	Capaian 2017 Banding RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Peningkatan jumlah investor	40 investor	43 investor	35 investor	122.86	60	71.67
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	81 %	59.29	80 %	74.11	85 %	69,75
3	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	100 %	90 %	90 %	100	100 %	90 %
4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %

## EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### Sasaran 1 : Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi

Program dari sasaran ini adalah Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Tujuan dari program ini adalah Mewujudkan peningkatan jumlah investor yang berinvestasi. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Peningkatan jumlah investor sebesar % Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 167.679.350,-realisasi sebesar Rp. 149.541.694- atau 89 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

1. Penyelenggaraan pameran investasi.  
Kegiatan ini terselenggara sebanyak tiga even yang diikuti yaitu di Menara Kuningan dan Makassar.
2. Fasilitasi Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyajikan data tentang potensi investasi yang ada di kabupaten Soppeng.

#### ***a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 1***

**Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian Kinerja
a.	Peningkatan jumlah investor	40	43	100 %

#### ***b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya***

**Tabel 3.5 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	2016	2017
----	-------------------	------	------

a.	Peningkatan jumlah investor	35	43
----	-----------------------------	----	----

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan tabel 3.5 capaian indikator kinerja sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran 1 dengan indikator kinerja peningkatan jumlah investor sebesar 100 %.

**d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Peningkatan jumlah investor	107,5	<b>82.67</b>	<b>28 %</b>
	<b>Rata – rata capaian Kinerja</b>	<b>90</b>		

Jika capaian kinerja pada sasaran 1 dirata-ratakan maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1 ini adalah 100 %, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 82,67 % maka efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 1 adalah sebesar 28 %.

**e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Program dari sasaran ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pendukung kepada aparatur untuk melaksanakan kegiatan untuk memudahkan

pelayanan. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 167.679.350 realisasi sebesar Rp. 149.541.694,- atau 89,18 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah

1. Penyelenggaraan Pameran investasi
2. Fasilitasi Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah

#### **f. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

##### **Permasalahan yang dihadapi :**

1. **Ketersediaan** Data Profil investasi yang belum memadai
2. Ketepatan penyerapan anggaran belum sesuai dengan jadwal kegiatan

##### ***Solusi :***

1. Meningkatkan kemampuan SDM di bidang Penanaman Modal dalam menyajikan data potensi investasi.
2. Meningkatkan kualitas SDM di bidang Penanaman Modal

#### **h. Keberhasilan**

Berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng telah berhasil dalam melakukan beberapa hal antara lain : Kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah.

Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 . Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi



No	Indikator	Kondisi Awal	2017			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Peningkatan jumlah investor	35	40	43	107,5	45	95,55

Untuk tahun 2017, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang tinggi, capaian ini juga menyumbang sebanyak 107,5 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2017, dipengaruhi oleh kegiatan yang dilaksanakan pada bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Terhadap peningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya.

1. Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh program/kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi. Sehingga dapat memperoleh informasi tentang potensi investasi di daerah.
2. Fasilitasi Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah, dengan adanya kegiatan peta potensi investasi maka diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor tentang potensi investasi yang ada di Kabupaten Soppeng

### **Permasalahan :**

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain :

1. Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan investasi masih kurang

2. Pembinaan dan pengawasan terkait potensi investasi belum optimal
3. Promosi tentang potensi investasi belum maksimal
4. Regulasi yang mendukung program peningkatan iklim dan promosi investasi belum ada.

Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan ini :

1. Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mengurus perizinan investasi dengan cara memberikan kemudahan dalam pengurusan izin.
2. Turun memantau jenis usaha yang memiliki nilai investasi
3. Menggiatkan kegiatan yang terkait promosi investasi
4. Menyusun regulasi yang berkaitan dengan Penanaman Modal

## **Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan**

### ***a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 1***

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Realisasi 2017</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
a.	Persentase penyelesaian izin tepat	81 %	59,9 %	72,84 %

### ***b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya***

**Tabel 3.2 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
-----------	--------------------------	-------------	-------------

a.	Persentase penyelesaian izin tepat	80 %	59,9 %
----	------------------------------------	------	--------

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan tabel 3.2 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran 2 dengan indikator kinerja persentase penyelesaian izin tepat waktu Tahun 2017 sebesar 59,9 %. dengan penyumbang terbesar dari kegagalan pencapaian target adalah Izin Mendirikan Bangunan, Surat Izin Tempat Usaha, Izin Gangguan, Izin Penelitian dan Izin Trayek.

**d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Persentase Penyelesaian izin tepat waktu	59.29	<b>354.255.700 atau 97,17</b>	<b>23,99 %</b>
	<b>Rata – rata capaian Kinerja</b>	<b>73,19</b>		

Jika capaian kinerja pada sasaran dirata-ratakan maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran 2 ini adalah 73.19 %, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 97,17 % maka efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 2 adalah sebesar 23, %.

**e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Program dari sasaran ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pendukung kepada aparatur untuk melaksanakan kegiatan untuk memudahkan pelayanan.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 364.675.000.000 realisasi sebesar Rp. 354.255.700- atau 97.17 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan prosedur Pelayanan Publik  
Kegiatan ini berisi tentang penyusunan dokumen regulasi yang terakit dengan pelayanan perizinan antara lain Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, serta regulasi yang terkait dengan tim tehnis yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan publik.  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan beberapa regulasi sebagai dasar penerbitan pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan dan Penanaman Modal. Kegiatan ini berisi penyelenggaraan tim tehnis yang menerbitkan rekomendasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Penyusunan dan Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan. Kegiatan ini berisi penyelenggaraan pada operator pelayanan pada front office.
5. Survey Kepuasan Masyarakat.  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, sebagai informasi dalam penyusunan program peningkatan kualitas layanan, pelibatan masyarakat dalam pengawasan layanan. Survey dilakukan empat periode masa triwulanan dalam 1 tahun.
6. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan.

Kegiatan ini merupakan pengembangan jaringan untuk mempermudah pemohon dalam mendapatkan informasi melalui layanan yang berbasis android.

7. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

Kegiatan ini berisi publikasi di media cetak dan media elektronik berupa pemberian informasi kepada pemohon tentang layanan perizinan dan non perizinan.

8. Monitoring dan evaluasi.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memonitoring dan mengevaluasi setiap layanan yang telah diberikan kepada pemohon dimana letak kekurangan serta untuk menyempurnakan pemberian layanan yang terbaik.

## **f. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

### **Permasalahan :**

Capaian untuk jumlah persentase penerbitan izin yang tidak mencapai target dengan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Penerbitan izin tergantung dari penerbitan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh tim teknis.
2. Penerbitan izin yang memakai persyaratan peninjauan lapangan tergantung dari waktu kunjungan tim teknis ke lapangan
3. Jangka waktu penandatanganan izin sangat tergantung dari kinerja aparat pelaksana dalam proses penerbitan izin mulai dari penerimaan berkas sampai kepada proses penandatanganan izin.
4. Perizinan yang memakai retribusi, kadang pemohon datang terlambat untuk membayar sehingga memakan jangka waktu penerbitan.

5. Kinerja aparat pelayanan belum maksimal sehingga penandatanganan kadang terhambat.
6. Aparat pelayanan di bagian pembuatan rekomendasi dan Berita Acara peninjauan lapangan kadang terlambat menerbitkan rekomendasi tersebut.
7. Bagian pencetakan izin kadang terlambat mencetak izin yang telah siap untuk diterbitkan.

**Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan ini :**

1. Koordinasi dengan Tim Tehnis
2. Menyusun regulasi yang mendukung kinerja tim teknis yang lebih efektif antara lain mengatur jadwal kunjungan tim teknis yang rutin.
3. Menempatkan ruangan khusus untuk tim teknis sehingga mereka lebih betah berkantor untuk menyelesaikan izin.
4. Mengevaluasi aparat pelayanan yang menyebabkan potensi keterlambatan izin.
5. Pengawasan yang diperketat untuk memantau kinerja pelayanan.
6. Memberikan reward bagi aparat yang berprestasi dan Sanksi bagi aparat pelayanan yang melanggar.

**g. Keberhasilan**

Berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng telah melakukan beberapa rekomendasi terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah dikeluarkan untuk tahun 2017.

Gambaran dari sasaran meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dilihat pada tabel di bawah dimana sebanyak 19 jenis perizinan dan 4 jenis non perizinan yang diterbitkan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 3.6 Tingkat penyelesaian dokumen perizinan dan non perizinan untuk Tahun 2017

NO	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN KELUAR	WAKTU PENYELESAIAN	
			SESUAI STANDAR	TERLAMBAT
<b>PERIZINAN</b>				
1	Izin Trayek Angkutan Kota	243	66	177
2	Izin Mendirikan Bangunan	561	258	303
3	Izin Rumah Sewa/Kamar Kost	1	1	0
4	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	0	0	0
5	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	0	0	0
6	Surat Izin Toko Modern	0	0	0
7	Surat Izin Usaha Perdagangan	292	227	65
8	Surat Izin Penempatan Reklame	4	4	0
9	Izin Lingkungan	0	0	0
10	Surat Izin Tempat Usaha	619	329	290
11	Izin Gangguan (HO)	390	141	249
12	Izin Usaha Industri	0	0	0
13	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	43	17	26
14	Izin Sarana Kesehatan	26	18	8
15	Izin tenaga kesehatan	748	652	96
16	Izin Lokasi	19	17	2
17	Izin pemanfaatan hasil hutan	0	0	0
18	Izin penelitian	442	227	215

19	Izin usaha perikanan	0	0	0
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3388</b>	<b>1957</b>	<b>1431</b>

NO	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN KELUAR	WAKTU PENYELESAIAN	
			SESUAI STANDAR	TERLAMBAT
NON PERIZINAN				
1	Tanda Daftar Perusahaan	291	228	63
2	Tanda Daftar Gudang	1	1	0
3	Tanda daftar Industri	19	13	6
4	Tanda daftar usaha pariwisata	10	7	3
<b>SUB TOTAL</b>		321	242	69
<b>TOTAL</b>		<b>3709</b>	<b>2199</b>	<b>1500</b>
Presentase sesuai				<b>59.29</b>
Presentase tidak sesuai				<b>40.44</b>

✚ *Persentase penyelesaian izin tepat waktu*

Berdasarkan Tabel Di atas , capaian indikator kinerja sasaran 2 dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian izin tepat waktu tahun 2016 adalah 80 %, tahun 2017 tidak mencapai target .Penyumbang terbesar dari kegagalan pencapaian target adalah pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dimana jumlah penerbitan izin sebanyak 561 buah ,258 sesuai dengan standar waktu sedang 303 terlambat.Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain Izin Mendirikan bangunan memerlukan peninjauan lapangan sehingga jangka waktu penerbitan izin memakan waktu yang agak lama untuk menerbitkan rekomendasi teknis untuk menerbitkan IMB tersebut.Demikian pula halnya dengan Surat Izin Tempat Usaha dari jumlah yang dikeluarkan sebanyak 619 yang sesuai dengan standar waktu 329,terlambat 290 hal ini disebabkan oleh Surat Izin Tempat Usaha juga memerlukan peninjauan lapangan untuk



menerbitkan rekomendasi teknis penerbitannya. sehingga sangat tergantung dari kinerja tim teknis dalam menerbitkan rekomendasi teknis. Sedang untuk penerbitan izin Penelitian meskipun tidak memakai peninjauan lapangan tetapi karena jangka waktu 1 hari maka otomatis izin harus diterbitkan hari itu juga, namun kadang penandatanganan rekomendasi memakan 1 hari juga, sehingga penerbitan juga terhambat.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan

No	Indikator	Kondisi Awal	2017			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase penyelesaian izin tepat	80 %	81 %	59.29 %	73,20	82 %	72,30

Untuk tahun 2017, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **sedang** capaian ini juga menyumbang sebanyak 72,30 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Kekurangan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2017, dipengaruhi oleh antara lain Izin Mendirikan Bangunan yang memerlukan peninjauan lapangan sehingga penyumbang terbesar dari kegagalan pencapaian target waktu yang telah ditentukan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

**Sasaran 3: Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 3**

**Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan**

No.	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian Kinerja
a.	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100 %	90 %	90

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.9. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.**

No	Indikator Kinerja	2016	2017
a.	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100 %	90

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan tabel 9 capaian indikator kinerja sasaran 3 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan dengan indikator

kinerja persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan sebesar 90 %.

**d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 3.**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	90 %	<b>94.12</b>	<b>-4</b>
	<b>Rata – rata capaian Kinerja</b>	<b>90</b>		

Jika capaian kinerja pada sasaran 3 dirata-ratakan maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 90 %, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 94.12% maka efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 3 adalah sebesar -4%.

**e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Program dari sasaran ini adalah Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur . Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung terhadap sarana dan prasarana aparatur untuk memberikan fasilitas pendukung kepada aparatur untuk melaksanakan kegiatan untuk memudahkan pelayanan. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 651.586.650 realisasi sebesar Rp. 613.293.404,- atau 94,12% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah

1. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
- 2.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  4. Penyediaan peralatan rumah tangga
  5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  6. Penyediaan bahan logistik kantor
  7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
  8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian kinerja
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
  2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

#### **f. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

##### **Permasalahan yang dihadapi :**

1. Keterbatasan jumlah personil PNS dengan volume kerja
2. Kemampuan SDM aparat pelayanan masih terbatas
3. Kemampuan teknis dari pelaksana kegiatan masih kurang sehingga serapan anggaran belum optimal

##### **Solusi :**

1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur lingkup Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang terkait dengan pembinaan jadwal penganggaran sesuai jadwal

3. Strategi penggunaan dana diarahkan kepada prioritas administrasi keuangan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

#### **h. Keberhasilan**

Berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng telah berhasil dalam melakukan beberapa hal antara lain:

1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung pelayanan
2. Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal.

#### **Sasaran 4: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor.**

##### ***a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 4***

**Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Realisasi 2017</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
a.	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %

##### ***b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya***

**Tabel 3.12 . Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.**

No	Indikator Kinerja	2016	2017
a.	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100	100

***c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.***

✚ *Pelaksana teknis kegiatan merealisasikan anggaran sesuai dengan jadwal peengaggaran yang telah ditetapkan.*

✚ *Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik*

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
4. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin berkala aplikasi

Berdasarkan tabel perkembangan capaian indikator kinerja sasaran 4 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator persentase adalah 100 %. Berdasarkan tabel 13, capaian kinerja pada sasaran ini mencapai target yang telah ditetapkan.

***d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

**Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 4.**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
-----	-------------------	---------------------	------------------------	-----------------

1	2	3	4	5
a.	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100	<b>84,67</b>	<b>15,33 %</b>
	<b>Rata – rata capaian Kinerja</b>	<b>100</b>		

Jika rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100 %, disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 84,67% maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 4 adalah 15,33 %

#### ***e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja***

Program dari sasaran ini adalah Program Pengembangan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dengan capaian sebesar 100 %.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 149.800.000 realisasi sebesar Rp. 126.842.400,- atau 84.67% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah

1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
4. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin berkala aplikasi

#### **f. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Capaian tersebut sudah maksimal

1. Meskipun capaian kinerja sudah maksimal namun masih terdapat capaian kegiatan yang belum memadai

Solusi :

1. Memberikan arahan kepada aparat pelaksana untuk bekerja lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan .
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal penganggaran yang telah dijadwalkan.



## **REALISASI ANGGARAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 1.431.415.499 atau 93.46 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan (97.17 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan 69 %

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran yang realisasi anggarannya mencapai .....% namun realisasi kinerjanya baru mencapai .....%. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Sasaran/Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Peningkatan jumlah investor	43 investor	107.5	167.679.350	149.540.694	89.18
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	81 %	73.20	364.575.000	354.255.700	97.17
3	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	90 %	90	749.361.050	707.105.178	94.36
4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	100	149.800.000	126.842.400	84.67

## Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebaiknya empat sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Meningkatnya minat investor dalam, telah mencapai kinerja sebanyak 107,5 .% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 89,18 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan , dengan pencapaian kinerja sebanyak 73,20 .%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 97,17.%.Sasaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dengan realisasi kinerja sebanyak 90 % sedang realisasi anggaran sebanyak 94,36 %,sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor

Dengan realisasi kinerja sebanyak 100 % dengan realisasi anggaran sebanyak 84,67 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisiensi menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Peningkatan jumlah investor	107,5	89,18	100

2	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	73.20	97.17	100
3	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	90	94.36	100
4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100	84.67	100

**Perencanaan** Kinerja tahun tahun 2017 dengan indikator kinerja dan target kinerja melalui kegiatan, dapat disajikan pada tabel berikut :

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategik</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Peningkatan jumlah investor	40 investor
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	81 %
3.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100 %
4.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu merupakan salah satu unit organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang diwajibkan membuat Laporan Kinerja Tahun 2017 dengan mengacu pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2017 pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan
- b. Pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 dengan melihat indikator *outcome*-nya, diketahui bahwa pencapaian program dan kegiatan tahun 2017 dapat dikatakan baik untuk 6 program dan 28 (dua puluh delapan) dengan rata-rata capaian indikator kegiatan.

Realisasi anggaran dana APBD tahun 2017 yaitu realisasi keuangan sebesar 94.07 % dan realisasi fisik 100 %.

Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Kinerja merupakan pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Laporan Kinerja ini diharapkan pula menjadi dasar kepada kepala unit kerja dan seluruh pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempersiapkan terselenggaranya *good governance*.

Watansoppeng, 13 Pebruari 2018

**KEPALZA DINAS,**

**FIRMAN SP MM**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19621112 198603 1 023

## LAKIP SEBELUM REVIZI OLEH BPKP

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan periode 2016-2021.

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Soppeng Tahun 2017.**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
1.	Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Peningkatan jumlah investor	40 investor	43
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	81 %	59 %
3	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100 %	90 %
4.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.



## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng tahun 2017 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

### Sasaran 1: Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1

**Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi**

No.	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian Kinerja
a.	Peningkatan jumlah investor	40	43	107,5

#### b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

**Tabel 3. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.**

No	Indikator Kinerja	2016	2017
a.	Peningkatan jumlah investor	35	41

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

**9. Peningkatan jumlah investor**

Pengukuran jumlah investor pada tahun 2017 yang didasarkan pada pengukuran indikator kinerja utama memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 107,5%. Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016 sebesar 35 investor, terlihat capaian pada tahun 2017 meningkat.

Jumlah investor	Tahun 2016	Tahun 2017
	35	43

**d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1.**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Peningkatan jumlah investor	107,5	<b>89.18</b>	<b>33,67</b>
	<b>Rata – rata capaian Kinerja</b>	<b>107,5</b>		

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 122,85 %, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 89.18 % maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 33,67 %.

#### ***e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja***

Program dari sasaran ini adalah Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Tujuan dari program ini adalah Mewujudkan peningkatan jumlah investor yang berinvestasi. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Peningkatan jumlah investor sebesar % Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 167.679.350,-realisasi sebesar Rp. 149.541.694- atau 89 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah

1. Penyelenggaraan pameran investasi.

Kegiatan ini terselenggara sebanyak tiga even yang diikuti yaitu di Menara Kuningan dan Makassar.

2. Fasilitasi Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyajikan data tentang potensi investasi yang ada di kabupaten Soppeng.

#### **f. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain :

1. Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan investasi masih kurang
2. Pembinaan dan pengawasan terkait potensi investasi belum optimal
3. Promosi tentang potensi investasi belum maksimal

4. Regulasi yang mendukung program peningkatan iklim dan promosi investasi belum ada

Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan ini :

- h. Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mengurus perizinan investasi dengan cara memberikan kemudahan dalam pengurusan izin.
- i. Turun memantau jenis usaha yang memiliki nilai investasi
- j. Menggiatkan kegiatan yang terkait promosi investasi
- k. Menyusun regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal

## **Sasaran 2: Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan**

### ***a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2***

**Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Realisasi 2017</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
a.	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	81 %	59.29 %	59.29 %

### ***b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 2***

**Tabel 7. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
a.	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	80 %	59 %

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

NO	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN KELUAR	WAKTU PENYELESAIAN	
			SESUAI STANDAR	TERLAMBAT
PERIZINAN				
1	Izin Trayek Angkutan Kota	243	66	177
2	Izin Mendirikan Bangunan	561	258	303
3	Izin Rumah Sewa/Kamar Kost	1	1	0
4	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	0	0	0
5	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	0	0	0
6	Surat Izin Toko Modern	0	0	0
7	Surat Izin Usaha Perdagangan	292	227	65
8	Surat Izin Penempatan Reklame	4	4	0
9	Izin Lingkungan	0	0	0
10	Surat Izin Tempat Usaha	619	329	290
11	Izin Gangguan (HO)	390	141	249
12	Izin Usaha Industri	0	0	0
13	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	43	17	26
14	Izin Sarana Kesehatan	26	18	8
15	Izin tenaga kesehatan	748	652	96
16	Izin Lokasi	19	17	2
17	Izin pemanfaatan hasil hutan	0	0	0
18	Izin penelitian	442	227	215

19	Izin usaha perikanan	0	0	0
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3388</b>	<b>1957</b>	<b>1431</b>

NO	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN KELUAR	WAKTU PENYELESAIAN	
			SESUAI STANDAR	TERLAMBAT
NON PERIZINAN				
1	Tanda Daftar Perusahaan	291	228	63
2	Tanda Daftar Gudang	1	1	0
3	Tanda daftar Industri	19	13	6
4	Tanda daftar usaha parawisata	10	7	3
<b>SUB TOTAL</b>		321	242	69
<b>TOTAL</b>		<b>3709</b>	<b>2199</b>	<b>1500</b>
Presentase sesuai				<b>59.29</b>
Presentase tidak sesuai				<b>40.44</b>

 *Persentase penyelesaian izin tepat waktu*

Berdasarkan Tabel 6, capaian indikator kinerja sasaran 2 dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian izin tepat waktu tahun 2016 adalah 80 %, tahun 2017 tidak mencapai target .Penyumbang terbesar dari kegagalan pencapaian target adalah pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dimana jumlah penerbitan izin sebanyak 561 buah ,258 sesuai dengan standar waktu sedang 303 terlambat.Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain Izin Mendirikan bangunan memerlukan peninjauan lapangan sehingga jangka waktu penerbitan izin memakan waktu yang agak lama untuk menerbitkan

rekomendasi teknis untuk menerbitkan IMB tersebut. Demikian pula halnya dengan Surat Izin Tempat Usaha dari jumlah yang dikeluarkan sebanyak 619 yang sesuai dengan standar waktu 329, terlambat 290 hal ini disebabkan oleh Surat Izin Tempat Usaha juga memerlukan peninjauan lapangan untuk menerbitkan rekomendasi teknis penerbitannya. Sehingga sangat tergantung dari kinerja tim teknis dalam menerbitkan rekomendasi teknis. Sedang untuk penerbitan izin Penelitian meskipun tidak memakai peninjauan lapangan tetapi karena jangka waktu 1 hari maka otomatis izin harus diterbitkan hari itu juga, namun kadang penandatanganan rekomendasi memakan 1 hari juga, sehingga penerbitan juga terhambat.

**d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2.**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	59.29	97.17 %	-37.88
	<b>Rata – rata capaian Kinerja</b>	59.29		

Persentase realisasi keuangannya yaitu 97,17 % maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 2 adalah -37.88 %.

**e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Program dari sasaran ini adalah Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 364.675.000.000 realisasi sebesar Rp. 354.255.700- atau 97.17 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan prosedur Pelayanan Publik  
Kegiatan ini berisi tentang penyusunan dokumen regulasi yang terakit dengan pelayanan perizinan antara lain Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, serta regulasi yang terkait dengan tim tehnis yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan publik.  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan beberapa regulasi sebagai dasar penerbitan pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan dan Penanaman Modal. Kegiatan ini berisi penyelenggaraan tim tehnis yang menerbitkan rekomendasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Penyusunan dan Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan. Kegiatan ini berisi penyelenggaraan pada operator pelayanan pada front office.
5. Survey Kepuasan Masyarakat.  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, sebagai informasi dalam penyusunan program peningkatan kualitas layanan, pelibatan masyarakat dalam pengawasan layanan. Survey dilakukan empat periode masa triwulanan dalam 1 tahun.
6. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan.  
Kegiatan ini merupakan pengembangan jaringan untuk mempermudah pemohon dalam mendapatkan informasi melalui layanan yang berbasis android.
7. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.



Kegiatan ini berisi publikasi di media cetak dan media elektronik berupa pemberian informasi kepada pemohon tentang layanan perizinan dan non perizinan.

8. Monitoring dan evaluasi.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memonitoring dan mengevaluasi setiap layanan yang telah diberikan kepada pemohon dimana letak kekurangan serta untuk menyempurnakan pemberian layanan yang terbaik.

#### **f. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Capaian untuk jumlah persentase penerbitan izin yang tidak mencapai target dengan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Penerbitan izin tergantung dari penerbitan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh tim teknis.
2. Penerbitan izin yang memakai persyaratan peninjauan lapangan tergantung dari waktu kunjungan tim teknis ke lapangan
3. Jangka waktu penandatanganan izin sangat tergantung dari kinerja aparat pelaksana dalam proses penerbitan izin mulai dari penerimaan berkas sampai kepada proses penandatanganan izin.
4. Perizinan yang memakai retribusi, kadang pemohon datang terlambat untuk membayar sehingga memakan jangka waktu penerbitan.
5. Kinerja aparat pelayanan belum maksimal sehingga penandatanganan kadang terhambat.
6. Aparat pelayanan di bagian pembuatan rekomendasi dan Berita Acara peninjauan lapangan kadang terlambat menerbitkan rekomendasi tersebut.

7. Bagian pencetakan izin kadang terlambat mencetak izin yang telah siap untuk diterbitkan.

Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan ini :

1. Koordinasi dengan Tim Tehnis
2. Menyusun regulasi yang mendukung kinerja tim tehnis yang lebih efektif anataro lain mengatur jadwal kunjungan tim tehnis yang rutin.
3. Menempatkan ruangan khusus untuk tim tehnis sehingga mereka lebih betah berkantor untuk menyelesaikan izin.
4. Mengevaluasi aparat pelayanan yang menyebabkan potensi keterlambatan izin.
5. Pengawasan yang diperketat untuk memantau kinerja pelayanan.
6. Memberikan reward bagi aparat yang berprestasi dan Sanksi bagi aparat pelayanan yang melanggar.

### **Sasaran 3: Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan**

#### ***1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 3***

**Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Realisasi 2017</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
a.	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	100 %	90 %	90 %

	umum dan keuangan			
--	-------------------	--	--	--

***m. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya***

**Tabel 10. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
a.	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100 %	90 %

***n. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.***

Berdasarkan tabel 9 capaian indikator kinerja sasaran 3 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan dengan indikator kinerja persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan sebesar 90 %.

***d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

**Tabel 11. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 3.**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>Realisasi Anggaran (%)</b>	<b>Efisiensi (3-4)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

a.	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	90 %	<b>94.12</b>	<b>-4</b>
	<b>Rata – rata capaian Kinerja</b>	<b>90</b>		

Jika capaian kinerja pada sasaran 3 dirata-ratakan maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 90 %, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 94.12% maka efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 3 adalah sebesar -4%.

#### ***e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja***

Program dari sasaran ini adalah Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur . Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung terhadap sarana dan prasarana aparatur untuk memberikan fasilitas pendukung kepada aparatur untuk melaksanakan kegiatan untuk memudahkan pelayanan. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 651.586.650 realisasi sebesar Rp. 613.293.404,- atau 94,12% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4. Penyediaan peralatan rumah tangga
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Penyediaan bahan logistik kantor
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian kinerja
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

#### **f. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Permasalahan yang dihadapi :

1. Keterbatasan jumlah personil PNS dengan volume kerja
2. Kemampuan SDM aparat pelayanan masih terbatas
3. Kemampuan teknis dari pelaksana kegiatan masih kurang sehingga serapan anggaran belum optimal

#### ***Solusi :***

1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur lingkup Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang terkait dengan pembinaan jadwal penganggaran sesuai jadwal
3. Strategi penggunaan dana diarahkan kepada prioritas administrasi keuangan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

#### **o. Keberhasilan**

Berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng telah berhasil dalam melakukan beberapa hal antara lain:

1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung pelayanan
2. Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal

**Sasaran 4: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor.**

***d. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 4***

**Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Realisasi 2017</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
a.	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %

***e. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya***

**Tabel 13. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
a.	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100	100

**f. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

✚ *Pelaksana tehnik kegiatan merealisasikan anggaran sesuai dengan jadwal peengaggaran yang telah ditetapkan.*

✚ *Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik*

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
4. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin berkala aplikasi

Berdasarkan tabel perkembangan capaian indikator kinerja sasaran 4 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator persentase adalah 100 %. Berdasarkan tabel 13, capaian kinerja pada sasaran ini mencapai target yang telah ditetapkan.

**d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 14. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 4.**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Persentase sarana dan prasaran kantor dalam kondisi baik	100	<b>84,67</b>	<b>15,33 %</b>
	<b>Rata – rata capaian Kinerja</b>	<b>100</b>		

Jika rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100 %, disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 84,67% maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 4 adalah 15,33 %

#### ***e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja***

Program dari sasaran ini adalah Program Pengembangan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dengan capaian sebesar 100 %.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 149.800.000 realisasi sebesar Rp. 126.842.400,- atau 84.67% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah

1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
4. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin berkala aplikasi

#### **f. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Capaian tersebut sudah maksimal



1. Meskipun capaian kinerja sudah maksimal namun masih terdapat capaian kegiatan yang belum memadai.

Solusi :

2. Memberikan arahan kepada aparat pelaksana untuk bekerja lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan .
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal penganggaran yang telah dijadwalkan.

### **C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017**

#### ***1. Realisasi Anggaran***

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.822.730.735,- (94.07 %)

#### 1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.391.315.335,- (94.70%)
- Belanja Langsung	Rp. 1.431.415.400,- (93.46%)
	<hr/>
Jumlah	Rp. 2.822.730.735,-,- (94,07%)

#### ***2. Pemanfaatan Anggaran***

- a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- 1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.317.544.475,- (94.70%)

## 2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.431.415.400,- (93.46%) dengan jumlah 6 program dan 26 kegiatan.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Target (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	651.586.650-	613.293.404,-	94.12	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	73.000.000	67.859.714	92.96	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.225.000	11.650.940	95.30	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000	1.508.000	60.30	100
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000	1.865.000	62.17	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.040.000	11.179.250	69.70	100

No	Program	Target (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
	Penyediaan bahan logistik kantor	800.000	465.000	58.13	100
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	225.021.650	218.958.500	97.31	100
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	298.500.000	279.318.500	93.57	100
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	149.800.000	126.842.400	84.67	100
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	18.000.000	18.000.000	100.00	100
	Pengadaan peralatan gedung kantor	26.800.000	22.683.250	84.64	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.000.000	23.709.150	79.03	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	2.450.000	16.33	100
	Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi	60.000.000	60.000.000	100.00	100
3	Program peningkatan profesionalisme aparatur	94.274.400	91.396.699	96.95	100
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	94.274.400	91.396.699	96.95	100
4	Program peningkatan pengembangan sistem	3.500.000	2.415.075	69.00	100

No	Program	Target (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
	laporan capaian				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1.250.000	874.875	69.99	100
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.250.000	1.540.200	68.45	100
5	Program peningkatan iklim dan promosi investasi	167.679.350	149.540.694	89.18	100
	Penyelenggaraan pameran investasi	91.929.350	75.994.694	82.67	100
	Fasilitasi pembuatan peta potensi investasi daerah	75.750.000	73.547.000	97.09	100
6	Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan	364.575.000	354.255.700	97.17	100
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pelayanan publik	9.000.000	8.500.000	94.44	100
	Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan publik	9.400.000	9.324.100	99.19	100
	Fasilitasi dan kordinasi pengelolaan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal	66.500.000	66.000.000	99.25	100
	Penyusunan dan pengolahan data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	122.000.000	117.000.000	95.90	100

No	Program	Target (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
	Survey kepuasan masyarakat	74.725.000	74.345.000	99.49	100
	Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan	60.000.000	59.824.600	99.71	100
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi	17.500.000	15.062.000	86.07	100
	Monitoring dan evaluasi	5.450.000	4.200.000	77.06	100

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu merupakan salah satu unit organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang diwajibkan membuat Laporan Kinerja Tahun 2017 dengan mengacu pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2017 pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan

- b. Pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 dengan melihat indikator *outcome*-nya, diketahui bahwa pencapaian program dan kegiatan tahun 2017 dapat dikatakan baik untuk 6 program dan 28 (dua puluh delapan) dengan rata-rata capaian indikator kegiatan.
- c. Realisasi anggaran dana APBD tahun 2017 yaitu realisasi keuangan sebesar 94.07 % dan realisasi fisik %.

Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Kinerja merupakan pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Laporan Kinerja ini diharapkan pula menjadi dasar kepada kepala unit kerja dan seluruh pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempersiapkan terselenggaranya *good governance*.

Watansoppeng, Pebruari 2018

**KEPALA DINAS,**

**FIRMAN SP MM**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19621112 198603 1 023

3.	Penyerapan anggaran dan laporan tepat waktu	Unit	12	12	1
Rata-Rata Persentase Pencapaian Sasaran (%)					1

Pengukuran Kinerja Aparatur berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama dapat diasumsikan melalui indikasi sebagai berikut :

- a. Persepsi pegawai terhadap ***pelayanan administrasi umum kepegawaian adalah cukup memuaskan***, dengan pertimbangan bahwa untuk kinerja para pegawai dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja para pegawai ;
- b. Ketepatan waktu dalam menyusun ***perencanaan program/kegiatan dan pelaporannya mencapitarget 100%***, dengan pertimbangan bahwa jumlah laporan yang harus diselesaikan pada akhir tahun sebanyak 6 dokumen, telah diselesaikan tepat waktu. Dokumen

tersebut antara lain : LAKIP 2014, LPPD 2014, LKPJ 2014, RKA 2014, DPA 2015 dan DPPA 2015

- c. Penyerapan anggaran dan laporan ***tepat waktu*** yang didukung dengan sarana prasarana aparatur berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua dengan pertimbangan jumlah kendaraan dalam kondisi baik sebanyak 14 unit dari seluruh jumlah kendaraan sebagai aset kantor sebanyak 15 unit.

*Promosi*